

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perang Dunia Kedua adalah konflik berskala global yang melibatkan negara-negara dari seluruh belahan dunia. Perang Dunia 2 berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945 dan memakan korban jiwa diperkirakan lebih dari 70 juta orang (dilansir dari *United States Census Bureau*, 2013), kematian yang terjadi langsung karena perang dikira – kira lebih dari 50 jutaan korban dan ditambah dengan perkiraan lebih dari 19 jutaan korban mati karena dampak dari perang seperti penyebaran penyakit dan kelaparan. Perang skala besar ini berdampak besar bagi perkembangan hubungan internasional dan juga memaksa perubahan dalam tata cara dunia berinteraksi.

Setelah Perang Dunia Kedua hubungan internasional dan diplomasi antar negara mengalami perubahan. Diplomasi antar negara menjadi lebih kompleks karena negara-negara harus membuat keputusan dengan mempertimbangkan banyak faktor, tidak hanya kedua negara yang berhubungan, juga dengan negara sekitar yang setelah perang dunia kedua sempat terbagi menjadi dua bagian besar yaitu blok barat dan timur, juga harus mempertimbangkan kepentingan negara terhadap banyak isu, seperti pengendalian senjata pemusnah massal, perdagangan internasional, krisis-krisis kemanusiaan dan juga upaya perdamaian pasca perang yang muncul dari waktu ke waktu. Seiring

berjalannya waktu, terjadi berbagai upaya diplomasi untuk memperbaiki hubungan antar negara pasca Perang Dunia Kedua, seperti upaya perdamaian di Timur Tengah, Krisis di Korea, juga perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Beberapa negara terutama yang terlibat dalam perang harus melalui masa memperbaiki kembali negaranya akibat Perang Dunia kedua. Melakukan pembayaran dan memberikan kompensasi kepada para korban yang telah mengalami pelanggaran serta berupaya untuk menstabilkan pemerintahan negara merupakan aspek-aspek dasar dalam memperbaiki fondasi negara dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga, terutama negara-negara yang sebelumnya menjadi korban penjajahan, seperti yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan selama Perang Dunia. Kedua negara ini pernah berkonflik pada masa tersebut, namun saat ini telah ada upaya normalisasi hubungan antara keduanya dengan melakukan berbagai bentuk kerjasama. Meskipun demikian, kemungkinan adanya luka-luka lama bisa mengganggu hubungan diplomatik antara kedua negara.

Jepang dan Korea Selatan merupakan dua negara di Asia yang mempunyai hubungan sejarah yang sangat panjang. Kedua negara ini menjadi negara yang berpengaruh satu sama lainnya. Adanya konflik sejarah yang melatarbelakangi hubungan antara negara Jepang dan Korea Selatan menjadi tidak baik. Anggapan tersebut kemudian coba dijadikan salah satu unsur oleh pemerintah Korea Selatan untuk melakukan upaya normalisasi keadaan dengan membuat sebuah kerjasama dengan Jepang pada tahun 1998, dimana melalui kerjasama tersebut dapat menjadi media bagi pemerintah Jepang untuk melakukan langkah

damai atas apa yang terjadi saat masa kolonialisasi militer Jepang di wilayah Korea Selatan dan juga awal yang baik untuk bentuk kerjasama yang lain.

Sebelumnya, Semenanjung Korea berada di bawah pemerintahan Jepang selama 35 tahun, dimulai dengan invasi Jepang pada tahun 1910 hingga 15 Agustus 1945. Pada akhirnya, Jepang menyerah kepada Sekutu dalam Perang Dunia Kedua setelah pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki (Hwalbin, Kim, dan Claire Shinhae Lee, 2017). Pada tahun yang sama, Jepang menarik pemerintahannya dari Semenanjung Korea. Akibat konflik di Korea, negara tersebut terbagi menjadi dua, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Mengingat sejarah yang kurang baik antara Jepang dan Korea Selatan, keduanya seharusnya bekerja sama untuk memperbaiki hubungan diplomatik guna mencapai perdamaian yang harmonis di antara negara-negara tersebut dan di wilayah tersebut.

Salah satu isu yang masih menjadi permasalahan antara kedua negara hingga saat ini adalah masalah Comfort Women. Dalam bahasa Korea, istilah Comfort Women dikenal sebagai *Jungshindae* (정신대), sementara dalam bahasa Jepang, istilahnya adalah Jugun Ianfu (従軍慰安婦). Kedua istilah ini mengacu pada wanita-wanita yang dipaksa menjadi korban prostitusi atau pekerja seksual oleh tentara Jepang selama masa penjajahan. Menurut penelitian, korban *Comfort Women* tidak hanya diperdagangkan sebagai barang dagangan, tetapi juga menjadi korban pemerkosaan, aborsi paksa, dan kekerasan seksual lainnya. Para ahli sejarah Korea Selatan tidak dapat mengkonfirmasi jumlah pasti korban *Comfort Women*, tetapi diperkirakan

jumlahnya mencapai lebih dari 50.000 orang (Bang-Soon L, Yoon, 2010). Menurut penelitian sejarah lainnya, jumlah *Comfort Women* diperkirakan mencapai sekitar 200.000 orang, yang sebagian besar berasal dari Korea dan sisanya dari berbagai wilayah Asia lainnya (Lai, Drace, 2002).

Kejadian ini termasuk salah satu tragedi kemanusiaan yang sangat keji dan tentu saja hal ini menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban-korban yang pernah mengalaminya, dan sebagai negara dengan korban terbesar, tragedy ini tentu sangat membekas bagi negara dan masyarakat dari Korea Selatan. Setelah melewati 2 dekade setelah Jepang menarik diri dari Korea, Jepang berusaha memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan Korea. Dari tahun 1965 sampai dengan saat ini ada beberapa usaha diplomasi Jepang mulai dari kunjungan, remunerasi moneter, juga pembuatan perjanjian. Upaya - upaya diplomasi yang dilakukan Jepang direspon secara beragam dari pemerintah Korea Selatan juga oleh para korban dan aktifis di sana, Respon beragam dari menerima dan ada juga yang menganggap ketidak seriusan Jepang pada upaya tertentu.

Pada tahun 1965, tercapai suatu kesepakatan yang dikenal sebagai "Perjanjian Korea-Jepang 1965" atau juga disebut sebagai "Treaty on Basic Relationship," yang ditandatangani oleh kedua negara. Perjanjian tersebut mencakup aspek kerja sama ekonomi antara keduanya, upaya memperkuat hubungan diplomatik, serta penyelesaian berbagai masalah termasuk isu kepemilikan dan hak asasi manusia dari korban. Di dalam Pasal 1 Ayat 2 perjanjian tersebut, tertera bahwa berbagai permasalahan yang melibatkan

kepemilikan barang, hak kemanusiaan, dan kepentingan dari kedua belah pihak terhadap negaranya masing – masing dianggap sudah selesai. Berdasarkan ketentuan yang sudah dibuat, Jepang membuat pernyataan bahwa permasalahan yang ada di antara kedua negara, termasuk isu *Comfort Women*, dianggap telah diselesaikan. Namun, pada kenyataannya, masyarakat dari negara Korea Selatan merasa isu *comfort women* ini belum terselesaikan dengan baik dan dengan kejelasan karena pihak dari Pemerintah Jepang belum memberikan bantuan finansial atau meminta maaf secara resmi kepada para korban. Tentu saja, hal ini menimbulkan penolakan di kalangan masyarakat Korea Selatan.

Sebelumnya, sesuai dengan Perjanjian *Treaty on Basic Relationship*, Jepang sudah memberikan ganti rugi secara dalam bentuk ganti rugi finansial kepada Korea Selatan. Namun, sayangnya, seluruh ganti rugi finansial itu tidak segera diserahkan kepada korban kerja paksa atau korban *Comfort Women*, tetapi digunakan untuk pembangunan negara dan perbaikan infrastruktur. Tentu saja, masyarakat mendesak pemerintah Korea Selatan untuk melakukan negosiasi kembali sehingga para korban *Comfort Women* dapat menerima ganti rugi tersebut.

Pada tahun 1981, seorang diplomat Korea Selatan bernama Euy-Sang Yoo menerbitkan buku kritik terhadap Jepang yang berjudul "Diplomatic Property & Our Interest With Japan." Dalam bukunya ini, ia mengulas bagaimana Jepang secara tidak langsung menghindari tanggung jawabnya yang seharusnya dijalankan dalam upaya membangun hubungan diplomatik dengan Korea Selatan. Salah satu isu yang dibahas oleh Euy-Sang Yoo adalah masalah

Comfort Women. Ia mencatat bahwa isu *Comfort Women* sebelumnya tidak pernah dibahas dalam pertemuan sebelumnya, sementara pihak Jepang telah mencoba menggeneralisirnya sebagai bagian dari penyelesaian finansial yang mereka berikan.

Pada tahun yang sama, korban *Comfort Women* dari Korea Selatan akhirnya mengajukan tuntutan terhadap pemerintah Jepang untuk menuntut pertanggungjawaban dan permintaan maaf resmi, karena hingga tahun 1991, Jepang masih menolak untuk memberikan ganti rugi untuk para korban. Dengan tiga negara korban *Comfort Women* lainnya, yaitu Filipina, China dan Taiwan mereka mengajukan total 10 tuntutan. Namun, disayangkan, pada tahun 2010, ke-10 tuntutan tersebut kalah dalam banding dengan Jepang, sehingga gugatan-gugatan tersebut dibubarkan, dan pihak korban *Comfort Women* tidak dapat mengklaim hak yang seharusnya dimiliki.

Pada bulan Agustus 1991, setelah isu mengenai *Comfort women* mulai mendapatkan perhatian kembali, satu orang yang merupakan korban dari sistem *Comfort women* yang memiliki nama Hak-Sun Kim mengadakan konferensi pers sebagai bentuk kesaksian pribadinya sebagai seorang korban mantan *Comfort women* yang menderita selama pemerintah Jepang menduduki kekuasaan di Semenanjung Korea. Hak-Sun Kim menjadi pionir dalam memberikan suara wanita melalui kesaksiannya sebagai korban *Comfort Women*. Tidak lama setelah konferensi pers tersebut, banyak korban lainnya yang akhirnya mau berbicara tentang perlakuan dari para tentara Jepang yang memaksa mereka bekerja sebagai *Comfort Women*.

Pada tahun 1991 juga, di bulan Desember, tiga orang dari korban mantan *Comfort Women* yang berasal dari Korea Selatan secara individu mengajukan klaim hukum terhadap Pemerintahan Jepang di Pengadilan Tokyo. Pada tahun berikutnya tepatnya April 1992, ada enam korban lainnya yang juga mengajukan klaim secara individual. Klaim ini menyoroti bahwa isu ini adalah tentang pelanggaran hak asasi manusia dan tidak perlu melibatkan hubungan diplomatik antara kedua negara. Klaim tersebut bertujuan untuk memperkuat hak-hak perempuan sehingga mereka memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerima kompensasi yang adil dari pemerintah Jepang.

Dalam konteks ini, Jepang masih belum mengakui kesalahannya terhadap Korea Selatan. Dari segi hukum, Pemerintah Jepang tidak menganggap dirinya bertanggung jawab atas masalah *Comfort Women* karena mengaku bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh pihak swasta. Pada tahun 1997, Shinzo Abe memberikan pernyataan yang menyatakan bahwa pemerintah Jepang seharusnya tidak mengakui tanggung jawab terhadap *Comfort Women*, dengan alasan dimana perempuan Korea tidak diberi paksaan untuk bekerja sebagai *Comfort Women*, melainkan perempuan itu sendiri yang memilih untuk melakukan pekerjaan tersebut atas keinginan mereka sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah Jepang menolak untuk memberikan ganti rugi kepada para korban mantan *Comfort Women*, meskipun terdapat dorongan dari pihak lain.

Pada bulan Maret 2001, ada tiga kelompok perlawanan di Jepang memulai kampanye yang disebut "*Promotion of Resolution for the Issues Concerning Victims of Wartime Sexual Coercion Bill*." Pada akhirnya, mereka berhasil

mengumpulkan total 610.000 persetujuan dalam bentuk tanda tangan dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Polandia, Thailand, Jerman, Kanada, Skotlandia, dan negara-negara lain di seluruh dunia. Ini adalah tindakan yang menunjukkan bahwa adanya sikap peduli dari masyarakat dunia terhadap korban dari masalah *comfort women* ini.

Pada tahun 2007, pemerintah Jepang tetap mengklaim bahwa tidak ada bukti yang mendukung adanya pelaksanaan prostitusi secara paksa terhadap warga Korea Selatan. Mereka juga menolak mengategorikan *Comfort Women* sebagai bagian dari pekerja seksual, melainkan menganggap *Comfort Women* sebagai figur pelayan yang sebelumnya telah dengan sukarela menjalankan tugas mereka.

Setelah berlarut-larut, pemerintah Jepang yang selama ini menolak untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada *Comfort Women*, kini sedang menghadapi kembali pengangkatan isu ini oleh Korea Selatan untuk diperbincangkan secara langsung. Pada bulan November 2015, kedua negara kembali membahas isu *Comfort Women* yang selama beberapa dekade belum mencapai kesepakatan. Pada Desember 2015, akhirnya mereka mencapai kesepakatan yang disebut "Perjanjian *Comfort Women* Jepang-Korea Selatan." Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan resmi dengan Jepang menyampaikan permintaan maaf yang resmi kepada para korban mantan *Comfort Women*, dan Jepang akan memberikan kontribusi sebesar 1 miliar yen atau sekitar \$8,3 juta untuk pembangunan

tempat penampungan bagi korban yang masih menderita akibat *Comfort Women* kepada pemerintah Korea Selatan.

Di sisi lain, Korea Selatan sebaiknya menghentikan tanggapan kritis terhadap Jepang mengenai isu *Comfort Women* dan segera menghapus patung peringatan korban *Comfort Women* yang terletak di kedutaan Jepang di Seoul, Korea Selatan. Pemerintahan Korea Selatan yang saat itu dipimpin oleh mantan Presiden Geun-Hye Park menyetujui persyaratan yang diajukan oleh pemerintahan Jepang dan dengan cepat menghapus patung peringatan tersebut. Setelah berlalu beberapa dekade, pemerintahan Jepang akhirnya secara resmi meminta maaf kepada para korban *Comfort Women* dan sebagai tanggung jawab terhadap para korban, mereka memberikan bantuan untuk mendirikan sebuah yayasan yang bertujuan memberikan tempat perlindungan bagi para korban *Comfort Women*.

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai materi yang digunakan sebagai pembandingan dan acuan. Penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini ada 3 : Pertama, Sebuah skripsi karya Cheryl Angelike Christina Lay dari Universitas Katolik Parahyangan dengan judul : PENGARUH *COMFORT WOMEN* DEAL 2015 TERHADAP SENTIMEN ANTI-JEPANG DI KOREA SELATAN. Penelitian ini membahas tentang bagaimana gerakan anti-Jepang yang bertumbuh dan hadir di dalam masyarakat Korea Selatan. Persamaan yang terdapat di penelitian ini dibandingkan dengan yang dilakukan peneliti adalah membahas tentang *Comfort Women* dan dampaknya ke negara Korea Selatan dan Jepang. Perbedaan yang terdapat di penelitian ini dibandingkan dengan

yang dilakukan peneliti adalah sudut pandang diambil dari sisi Korea Selatan yaitu melihat sentimen Anti-Jepang di Korea Selatan.

Kedua, Sebuah skripsi karya Sylva Fahri Nailannaja dari Universitas Islam Indonesia dengan judul : **ESKALASI KONFLIK KOREA SELATAN DAN JEPANG: STUDI KASUS PERANG DAGANG 2017 – 2020**. Dalam penelitian ini akan lebih membahas bagaimana eskalasi konflik pada perang dagang Korea Selatan dan Jepang di tahun 2017-2020. Persamaan yang terdapat di penelitian ini dibandingkan dengan yang dilakukan peneliti adalah membahas hubungan antara Jepang dan Korea Selatan serta bagaimana kondisinya setelah suatu konflik. Perbedaan yang terdapat di penelitian ini dibandingkan dengan yang dilakukan peneliti adalah objek permasalahan yang diambil berbeda yaitu perang dagang dibandingkan dengan permasalahan *Comfort Women*.

Ketiga, Sebuah skripsi karya Dian Adilia Sarsa Gardina dari Universitas Pasundan dengan judul: **SENGKETA PULAU TAKESHIMA (DOKDO) ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF REALISME**. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menjelaskan klaim yang diajukan oleh Korea Selatan terhadap pulau Dokdo, serta klaim yang diajukan oleh Jepang terhadap pulau Takeshima. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana konflik antara kedua negara tersebut berkembang seiring waktu terkait klaim kepulauan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menyelidiki bagaimana perspektif realisme berperan dalam sengketa terkait kepulauan Takeshima (Dokdo). Persamaan yang terdapat di penelitian ini dibandingkan dengan yang dilakukan peneliti adalah

membahas hubungan antara Jepang dan Korea Selatan serta bagaimana kondisinya setelah suatu konflik. Perbedaan yang terdapat di penelitian ini dibandingkan dengan yang dilakukan peneliti adalah objek permasalahan yang diambil berbeda yaitu sengketa antara Jepang dan Korea Selatan mengenai kepemilikan pulau Takeshima (Dokdo) dan dampaknya pada hubungan luar negeri kedua negara tersebut dibandingkan dengan permasalahan *Comfort Women*.

Penelitian ini dibuat untuk melihat bagaimana kondisi diplomasi dari Jepang dan Korea Selatan, untuk melihat bagaimana penanganan isu *Comfort Women* yang menjadi sumber ketegangan antara kedua negara. Dengan memahami bagaimana Jepang telah mencoba menangani isu sensitif ini secara diplomatik dan bagaimana respons Korea Selatan terhadap upaya tersebut dapat dilihat bagaimana masa depan dari hubungan kedua negara tersebut.

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah yang telah dipelajari oleh peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. antara lain sebagai berikut:

1. Diplomasi dan Negosiasi

Mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana prinsip dasar jalannya diplomasi dan negosiasi, siapapun aktornya. Dipenelitian ini dilihat bagaimana usaha Jepang bernegosiasi untuk perdamaian dengan Korea Selatan soal masalah *comfort Women*.

2. Teori Hubungan Internasional

Mata kuliah ini mempelajari tentang pola interaksi hubungan internasional yang berlangsung berdasarkan teori yang diteliti para ahli. Peneliti dapat melihat bagaimana kedua negara baik bagaimana usaha Jepang melakukan diplomasi juga bagaimana respon dari Korea Selatan dan masyarakatnya terkait upaya perdamaian dari Jepang.

3. Dinamika Politik Internasional

Mata kuliah ini mempelajari tentang jalannya politik di dunia internasional, bagaimana dinamika pembuatan dan pergerakan kebijakan politik secara internasional. Peneliti mencoba melihat bagaimana diplomasi yang dilakukan Jepang dilihat dari segi politik salah satunya tentang pembuatan perjanjian perdamaian dengan pemerintahan Korea Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul: “**Diplomasi Jepang Terhadap Korea Selatan Dalam Menangani Masalah *Comfort Women***”

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah mayornya yaitu: “Bagaimana Diplomasi Jepang Terhadap Korea Selatan Dalam Menangani Masalah *Comfort Women*?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah mayor kemudian diturunkan menjadi rumusan masalah minor.

Peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apa upaya penyelesaian Jepang dengan Korea Selatan mengenai masalah *comfort Women*?
- 2) Kendala apa yang menghambat diplomasi antara Jepang dan Korea Selatan untuk menyelesaikan masalah *comfort Women*?
- 3) Bagaimana hasil dari upaya diplomasi Jepang dalam memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan mengenai masalah *comfort Women*?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan yang penulis telah uraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis menentukan Pembatasan masalah hanya pada diplomasi yang berasal dari Jepang mengenai usaha perdamaian mengenai masalah *Comfort Women*. Penelitian dilakukan dengan membatasi waktu dari tahun 2015 dimana “*Japan-South Korea ‘comfort Women’ agreement*” mulai berlaku sampai saat ini.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka maksud dari penulisan penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan dalam menangani masalah *comfort Women*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Upaya Jepang dalam penyelesaian masalah *comfort Women* dengan Korea Selatan.
2. Untuk Menganalisis kendala yang menghambat diplomasi antara Jepang dan Korea Selatan untuk menyelesaikan masalah *comfort Women*.
3. Untuk Mengidentifikasi hasil dari upaya diplomasi Jepang dalam memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan mengenai masalah *comfort Women*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Setelah dilakukan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman dalam bidang studi Hubungan Internasional, Analisis Politik Luar Negeri, Organisasi Internasional, serta menjadi sumber tambahan informasi yang berguna dalam pembelajaran, khususnya bagi mereka yang mempelajari masalah-masalah hubungan internasional, terutama terkait Diplomasi Jepang dalam Menangani Masalah *Comfort Women* dengan Korea Selatan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini melibatkan peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan peneliti dalam Ilmu Hubungan Internasional. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber tambahan informasi dan studi

empiris bagi kalangan akademisi serta masyarakat umum. Selain itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi para pembelajar Ilmu Hubungan Internasional, baik dalam lingkup akademis maupun bagi masyarakat umum.